

Perekonomian Timor Timur: Profil dan Prospek

Joao Mariano de Sousa SALDANHA

Pendahuluan

JARUM sejarah Timor Timur berputar pada tahun 1976 ketika daerah itu secara resmi bergabung dengan Indonesia akibat diundangkannya UU No. 7 Tahun 1976 tentang penyatuan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Dengan demikian berakhirlah masa yang panjang (\pm 450 tahun) bersama Portugal, negara yang menjalakan kolonialisme brutal dan menimbulkan kemiskinan evolusioner masyarakat Timor Timur.

Kini kita jelang 15 tahun penyatuan tersebut dan selama itu pula telah dicanangkan pembangunan yang dimulai dengan masa rehabilitasi, konolidasi dan stabilisasi (1976-1979). Kemudian diteruskan dengan pembangunan lima tahun pada pertengahan 1979 hingga sekarang.

Di balik intensifnya pembangunan itu kita tergelitik oleh perdebatan mengenai makna pembangunan secara mondial. Sejak tahun 1950-an hingga awal dekade 1990-an

makna dan ukuran pembangunan terus berubah. Dalam situasi semacam itu timbul pertanyaan bagaimana makna pembangunan bagi Timor Timur? Tentu jawabannya tidak mudah. Untuk itu mari kita telusuri sejenak babak-babak perumusan arti dan ukuran pembangunan agar bisa mendapat gambaran yang jelas supaya bisa menempatkan prekonomian Timor Timur pada proporsi yang sebenarnya.

Sesudah itu akan diteruskan dengan profil ekonomi Timor Timur pada bagian ketiga, disusul dengan potensi Timor Timur pada bagian keempat. Lalu uraian tentang masa sesudah keterbukaan pada bagian lima, strategi alternatif pembangunan Timor Timur pada bagian enam dan bagian tujuh mengenai pembangunan Timor Timur dalam konteks IBT (Indonesia Bagian Timur). Akhirnya sebuah catatan penutup.

Makna Pembangunan

Babak pertama definisi pembangunan dimulai pada akhir tahun 1950-an hingga

1960-an ketika PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mencanangkan dekade pertama pembangunan. Pada saat itu banyak negara Dunia Ketiga satu demi satu mulai melepaskan diri dari kolonialisme. Pada dekade pertama pembangunan yang dimaksud dengan pembangunan adalah usaha meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi (*growth oriented strategy*). Strategi yang menekankan pada pembangunan sektor-sektor modern dan bersifat padat modal itu berhasil menaikkan pendapatan per kapita negara-negara yang sedang melaksanakan pembangunan. Namun demikian juga melahirkan berbagai masalah antara lain ketidakmerataan pembagian hasil pembangunan. Konsentrasi kekayaan dan kekuatan ekonomi di tangan sebagian kecil orang dan efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) yang semula diharapkan tidak berjalan, menyebabkan kemiskinan malah bertambah dengan bertambahnya pendapatan per kapita.

Oleh karena itu disadari bahwa pembangunan tidaklah semata-mata pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi yang diperlukan (*necessary*) tetapi tidak cukup (*not sufficient*) bagi proses pembangunan yang bersifat multidimensional. Oleh karena itu muncul definisi pembangunan yang kedua pada awal 1970-an. Babak kedua definisi pembangunan tersebut dipelopori oleh Dudley Seers dan didukung oleh Dennis Goulet. Keduanya adalah ahli ekonomi pembangunan. Dudley Seers mengatakan bahwa pembangunan harus meliputi tiga aspek, yaitu penghapusan kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pembagian pendapatan. Apabila salah satu atau dua apalagi ketiga unsur itu gagal dicapai maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi pembangunan (Esmara, 1986: 13).

Untuk memperkuat argumentasi Seers tersebut Dennis Goulet mengemukakan tiga nilai hakiki pembangunan yang jauh lebih luas dari ukuran-ukuran statistika semata-mata. Ketiga nilai tersebut adalah:

1. Kebutuhan untuk hidup, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan.
2. Harga diri dari manusia (*self esteem*) untuk tidak dijadikan sebagai alat orang lain demi mencapai kepentingan mereka sendiri.
3. Bebas dari perbudakan (*freedom from servitude*) bukan dalam arti ideologis tetapi bebas dari kebodohan, ketergantungan dan kesedihan. Bebas untuk memilih bagi setiap masyarakat dan anggota-anggotanya secara bersama-sama untuk menghindari paksaan atau tekanan dari luar guna mencapai tujuan sosial yang dinamakan pembangunan (Todaro, 1983: 125-127).

Reaksi terhadap pandangan Seers dan Goulet tersebut adalah munculnya strategi kebutuhan dasar yang juga dicanangkan oleh PBB pada dekade 1970-an. Kebutuhan dasar itu terbagi dalam dua kategori pokok. Pertama, kebutuhan dasar akan pangan, papan dan sandang serta peralatan rumah tangga. Kedua, kebutuhan dasar masyarakat secara keseluruhan seperti air minum, sanitasi, pengangkutan umum dan kesehatan, fasilitas-fasilitas pendidikan dan kebudayaan.

Babak ketiga definisi pembangunan dimulai pada awal dekade 1980-an. Isu yang paling dominan sesudah sekian tahun menjalankan pembangunan adalah ketergantungan yang makin besar terhadap bantuan luar negeri dan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Oleh karena itu redefinisi

konsep pembangunan harus mencakup kedua aspek tersebut. Perlu dilaksanakan pembangunan yang bersifat mandiri sambil menjaga keseimbangan lingkungan agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Babak terbaru pengertian pembangunan muncul pada awal dekade 1990-an ini. Terbitnya buku *Human Development Report* yang ditulis oleh sejumlah pakar UNDP (Badan PBB untuk Pembangunan) menyarankan agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipakai sebagai tolok ukur pembangunan. IPM mengandung tiga unsur pokok, pertama ia bersifat berkelanjutan (*longevity*) yang diukur dengan tingkat harapan hidup. Indikator ini mencerminkan tingkat gizi, kesehatan dan kondisi lingkungan hidup. Kedua, pengetahuan dengan menggunakan akses terhadap pendidikan dan kualitasnya. Sedangkan dimensi ketiga adalah standar hidup yang diukur dengan GNP (Pertumbuhan Nasional Bruto) per kapita. Indikator ini mencerminkan daya beli (*purchasing power*) komoditi kebutuhan dasar (*Kompas*, 12 Januari 1991).

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan itu bersifat multidimensional. Tidak hanya meliputi bidang-bidang yang bisa diukur secara statistika seperti GDP atau sebaliknya meliputi aspek-aspek kualitatif saja seperti harga diri manusia tetapi pembangunan haruslah merupakan paduan di antara kedua bidang tersebut.

Definisi-definisi tersebut mengkaji permasalahan pembangunan pada aras (*level*) negara. Sedangkan kajian dalam tulisan ini bersifat regional (propinsi), bagaimana bisa mempertemukan keduanya? Pada dasarnya konsep-konsep pembangunan yang dipakai pada aras nasional bisa dipakai pada aras re-

gional. Yang berbeda adalah tingkatan pemerintahannya saja. Oleh karena itu dalam menganalisis perekonomian Timor Timur akan dipakai konsep-konsep tersebut di atas dengan sedikit modifikasi. Seperti Produk Domestik Bruto (PDB) pada aras nasional dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada aras regional dan negara sedang berkembang dipakai propinsi sedang berkembang.

Profil Ekonomi

Menelusuri pembangunan Timor Timur, ada beberapa kesan penting. Pertama, pelaksanaan pembangunan adalah kemauan politik pemerintah untuk segera mengangkat taraf hidup masyarakat. Hal ini merupakan justifikasi dan legitimasi dari penyatuan Timor Timur dengan Indonesia. Kedua, konsekuensi dari justifikasi itu muncul pertanyaan bagaimana agar hasil pembangunan segera kelihatan dan segera dinikmati. Untuk memenuhi keinginan tersebut satu-satunya pilihan strategi yang layak adalah strategi pertumbuhan guna memacu lajunya pembangunan. Ternyata benar, hasil pembangunan cukup menakjubkan seperti ditunjukkan oleh Tabel 1.

Secara keseluruhan semua indikator sosial ekonomi menunjukkan perbaikan selama dekade 1980-an. Hal ini dapat dilihat dari turunnya jumlah penduduk buta huruf dari 65,9% pada tahun 1985 menjadi 54,5% empat tahun kemudian. Begitu juga dengan angka kematian bayi. Di lain pihak terjadi kenaikan pendapatan per kapita berdasarkan harga konstan 1983, yaitu dari Rp.134.002 pada tahun 1983 menjadi Rp.166.931 pada tahun 1988.

Melihat hasil-hasil tersebut tentu kita semua setuju bahwa Timor Timur telah

mengalami kemajuan yang cukup berarti sesudah bergabung dengan Indonesia bila dibandingkan dengan pada masa kolonial Portugal. Hal ini juga didukung dengan pertumbuhan PDRB yang digambarkan pada Tabel 2.

Tabel 1

INDIKATOR SOSIAL EKONOMI TERPILIH
TIMOR TIMUR

No. Indikator	Tahun		
	1983	1987	1989
1. Penduduk	601.938	657.411	701.196
2. Buta Huruf	-	65,9% (85)	54,5%
3. Pendapatan/ Kpt (Rp)	134.002	157.148	166.931
4. Angka Harapan Hidup	-	-	57 tahun
5. Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran	-	47	40

Sumber: - Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Timor Timur 1989
Indikator Kesejahteraan Timor Timur, 1986

Tabel 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Timor Timur secara keseluruhan meningkat sejak tahun 1983 hingga 1988 kecuali turun sedikit pada tahun 1986. Hal ini diduga akibat krisis turunnya harga minyak yang menimbulkan jumlah dana pemerintah pusat yang dialokasikan ke Timor Timur mengalami penurunan. Akibatnya investasi pemerintah daerah turun dan mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi regional. Kelambatan pertumbuhan (5,7%) itu bisa dikompensasi dengan tingginya pertumbuhan pada tahun berikutnya yang langsung meroket menjadi 8,1%. Sedangkan

pertumbuhan rata-rata pada kurun waktu tersebut sebesar 6,03%. Jauh melebihi target 5% yang dicanangkan oleh PBB pada awal dekade pertama.

Tabel 2

PERTUMBUHAN PDRB TIMOR TIMUR
(Harga Konstan 1983)

No.	Tahun	Pertumbuhan (%)
1.	1983	tt
2.	1984	6,61
3.	1985	6,97
4.	1986	5,7
5.	1987	8,1
6.	1988	8,8

Sumber: Diolah dari Tabel-tabel Pokok Kantor Statistik dan BAPPEDA Tk. I Timor Timur, 1989.

Keberhasilan strategi pertumbuhan ini juga dapat dilihat pada kemajuan industri Timor Timur. Secara umum perekonomian suatu daerah dapat dibagi ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor primer (pertanian dan pertambangan), sektor sekunder (perdagangan dan industri) dan sektor tersier (jasa dan keuangan). Industrialisasi perekonomian dapat dilihat pada seberapa besar kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam pembentukan PDRB. Bila kedua sektor itu kontribusinya besar maka dapat dikatakan daerah tersebut industrinya sudah cukup maju. Sebaliknya bila sektor primer yang paling menonjol kontribusinya maka perekonomian itu masih sangat agraris.

Kedaaan Timor Timur menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dalam kurun waktu 1983 dan 1988 terjadi pergeseran struktural perekonomian dari agraris ke industrial. Hal ini diperkuat dengan penurunan kontribusi sektor primer dalam

pembentukan PDRB sebesar 45,02% pada tahun 1983 menjadi 39,47% tahun 1988. Sektor sekunder naik dari hanya 13,51% pada tahun 1983 menjadi 16,23% pada tahun 1988. Begitu juga dengan sektor tersier yang naik dari 41,47% pada tahun 1983 menjadi 44,3% pada tahun 1988. Itu berarti sumbangan sektor sekunder dan tersier dalam pembentukan PDRB pada tahun 1988 lebih dari 60%. Luar biasa. Gerakan pertumbuhan itu dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Pergeseran struktural perekonomian Timor Timur seperti ditunjukkan di atas mengungkapkan bahwa kemajuan daerah itu pada dekade lalu sangat pesat. Pertanyaannya adalah seberapa jauh validnya data tersebut dan hasil-hasil yang telah dicapai itu dapat memecahkan berbagai persoalan yang timbul akibat dari penerapan strategi pertumbuhan?

Agak sulit menjawab pertanyaan ini dan lebih sulit lagi bila dikaitkan dengan konsep pembangunan yang dikemukakan oleh Seers dan Goulet pada bagian kedua tulisan ini. Bisa diduga bahwa peningkatan-peningkatan secara statistika itu belum mencerminkan

pembangunan sesungguhnya oleh karena variabel-variabel kualitatif seperti kebebasan mengadakan pilihan, sikap senang dan tenteram belum bisa diukur. Bahkan kebebasan untuk mengadakan pilihan terutama dalam mengkonsumsi barang dan jasa masih terbatas oleh karena rendahnya daya beli masyarakat. Begitu juga ketenteraman mengolah dan membuka ladang baru masih sulit oleh karena faktor psikologis dan kekuatan lain di luar kemampuan mereka. Akibatnya *output* rendah yang bermuara pada rendahnya pendapatan masyarakat.

Terlepas dari itu optimisme selalu ada. Jika ada kemauan pemerintah untuk membangun dan menikmati hasil secepatnya, maka pemerintah juga tentu punya kemauan dan komitmen politik untuk membagi hasil-hasilnya secara adil kepada setiap anggota kelompok masyarakat. Begitu juga secara terus-menerus berusaha menciptakan situasi yang kondusif supaya mereka menikmati hasil pembangunan itu dalam suasana ketenangan dan ketenteraman. Oleh karena itu kini saatnya definisi pembangunan yang dikemukakan oleh Seers dan Goulet menjadi acuan bagi setiap perencana pembangunan Timor Timur.

Tabel 3

KONTRIBUSI SEKTORAL PDRB
(Harga Konstan 1983)

No.	Sektor	1983	1984	1985	1986	1987	1988
1.	Primer	45,02	45,03	43,11	42,05	40,47	39,47
2.	Sekunder	13,51	12,79	12,67	12,53	15,03	16,23
3.	Tersier	41,47	42,18	44,22	45,42	44,56	44,30
4.	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kantor Statistika dan BAPPEDA Timor Timur, 1989.

Potensi Ekonomi

Potensi daerah Timor Timur cukup besar, hanya belum dikembangkan maka terkesan daerah itu miskin. Berdasarkan keadaan alamnya dapat dikemukakan berbagai potensi ekonomi Timor Timur yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan antara lain padi, kopi, jagung, kopra dan ternak di sektor pertanian. Di bidang pertambangan ada minyak dan gas alam serta marmer. Sedangkan di bidang kehutanan ada cendana dan di sektor jasa tersimpan potensi pariwisata. Bila sudah dikelola secara penuh penerimaan daerah Timor Timur akan meningkat tajam dan cukup untuk membiayai seluruh pembangunan Timor Timur. Berikut diuraikan potensi beberapa bidang itu.

Padi

Pendapat umum masyarakat di luar Timor Timur mengatakan bahwa daerah itu bukanlah penghasil beras. Hal ini semata-mata karena kurang informasi terhadap keadaan yang sesungguhnya. Timor Timur adalah sebuah daerah penghasil beras, bahkan pada zaman Portugis daerah Uatu-Lari dan Uatu-Carbau dijuluki dengan *Celeiro de Timor* (Lumbung Timor) yang menghasilkan beras dalam jumlah ribuan ton per tahun. Belum lagi daerah-daerah lain penghasil beras seperti di kabupaten Baucau, Manatutu, Ermera dan Maliana. Gambaran lebih jelas mengenai produksi beras Timor Timur dapat dilihat pada Tabel 4.

Terlihat pada tabel di atas bahwa selama satu dekade terjadi kenaikan produksi padi dengan tingkat yang semakin meningkat. Hal ini diduga akibat dua faktor. Pertama,

masyarakat kembali mengolah sawah mereka secara perlahan-lahan dengan pulihnya keamanan dan "pembukaan (pencetakan)" sawah baru. Kedua, penerapan mekanisasi pertanian di beberapa daerah seperti di Saree (Ermera). Hal ini diperkuat dengan naiknya produktivitas setiap tahun.

Tabel 4

PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PADI TIMOR TIMUR

No. Tahun	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1. 1976	8.005,01	0,79
2. 1977	10.907,96	0,89
3. 1978	14.032,38	1,04
4. 1979	17.820,34	1,20
5. 1980	22.876,16	1,41
6. 1981	28.183,23	1,59
7. 1982	29.771,00	1,67
8. 1983	31.663,00	1,67
9. 1984	33.843,00	1,61
10. 1985	36.355,00	1,79

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Timor Timur.

Tabel 5

EKSPOR BERAS TIMOR TIMUR 1951 DAN 1953

No. Tahun	Ekspor (Ton)	Penerimaan (Patacas)*
1. 1951	278	85.440
2. 1953	148	52.000
3. Jumlah	426	137.440

* 1 Patacas = \$6 (Escudo Portugis),
\$1 Escudo = ± Rp. 100, kurs 1975.

Sumber: Felgas, 1954.

Secara tradisional masyarakat Timor Timur punya makanan pokok beras (utama) dan jagung (kedua). Bahkan pada zaman Portugis sudah dapat mengekspor seperti ditunjukkan dalam Tabel 5.

Juga disebutkan bahwa negara klien ekspor Timor Timur pada waktu itu adalah Belanda dan Malaysia (Felgas, Ibid.: 513). Dengan tingkat keyakinan yang cukup besar dapat dikatakan bahwa bila semua areal persawahan Timor Timur terutama sepanjang pesisir pantai selatan sudah dikelola lagi dengan baik, maka Timor Timur akan muncul sebagai salah satu daerah pengekspor beras baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Kopi

Sama halnya dengan padi komoditi andalan lain Timor Timur adalah kopi. Perdagangan tanaman ini menduduki urutan pertama ekspor Timor Timur baik pada zaman Portugal maupun sekarang. Hal ini dilihat pada Tabel 6.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sejak akhir 1880-an hingga sekarang kopi Timor Timur sudah diekspor. Sayang tidak ada data yang mengungkapkan negara tujuan ekspor, tetapi bisa diduga ke Eropa dan Amerika, bahkan mungkin juga Asia. Walaupun produksinya berfluktuasi tetapi peranan kopi dalam ekspor keseluruhan Timor Timur selalu di atas 60% kecuali pada tahun 1860 dan 1910.

Bahkan pada tahun 1931 dan 1968 ekspor kopi tersebut persentasenya melampaui 90%. Keadaan ini menunjukkan bahwa kopi memainkan peranan yang sangat besar dalam perekonomian Timor Timur. Sayang data mengenai kopi ini tidak banyak tersedia sesudah Timor Timur bersatu dengan Indo-

nesia, sehingga analisisnya kurang berkembang. Yang jelas sesudah periode itu kopi Timor Timur dikelola secara tunggal oleh PT Denok (Salazar).

Tabel 6

JUMLAH DAN PERSENTASE EKSPOR KOPI TIMOR TIMUR

No. Tahun	Kopi (Ton)	Ekspor (%)
1. 1860	23	8,80
2. 1865	148	65,90
3. 1880	1.750	tt
4. 1891	1.266	tt
5. 1900	794	tt
6. 1905	721	63,00
7. 1910	1.057	53,10
8. 1915	1.242	77,10
9. 1920	895	60,70
10. 1925	1.672	80,40
11. 1931	2.438	95,00
12. 1939	878	80,00
13. 1950	1.396	77,80
14. 1955	tt	74,49
15. 1960	tt	63,22
16. 1965	tt	82,00
17. 1968	tt	91,32
18. 1982	2.968	tt
19. 1988	4.771	tt

tt = tidak tersedia

- Sumber: 1. Felgas, Ibid.: 4600
2. Monografia de Timor, 1970: 152
3. Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Timor Timur

Cendana

Salah satu daya tarik kedatangan orang Portugis ke Timor Timur adalah kayu cendana. Teofilo Duarte, Bekas Gubernur Timor Portugis mengatakan:

"Foi este produto lenhoso, que deu fama a Timor e que motivou a referencia que os Lusíadas lhe fazem num dos seus cantos" (1930:161).

Produk kayu berharga inilah yang telah memberikan kebanggaan bagi Timor dan memotivasi para Lusidas (sebutan kebanggaan bagi orang Portugis) menjadikannya sebagai salah satu tujuan.

Kayu cendana telah menjadi komoditi ekspor Timor Timur sejak tahun 1900-an. Dalam perkembangannya merosot baik harga maupun jumlah karena eksploitasi yang berlebihan tanpa menghiraukan kelangsungan hidup kayu tersebut. Itulah ciri kolonialis Portugis dalam mengeksploitasi kekayaan bangsa-bangsa lain.

Akibat merosotnya harga dan jumlah produksi maka pada tahun 1926 dan seterusnya pemerintah kolonial melarang ekspor cendana untuk selamanya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7

EKSPOR CENDANA TIMOR TIMUR

No.	Tahun	Cendana (Kg)
1.	1910	898.006
2.	1915	57.550
3.	1920	121.033
4.	1925	20.000
5.	1926	Ekspor dilarang

Sumber: Duarte, Ibid.: 161-162.

Setelah Timor Timur bersatu dengan Indonesia ada usaha-usaha baik legal maupun ilegal mengeksploitasi lagi kayu cendana. Tetapi sejauh mana eksploitasi itu tidak ada data yang mengungkapkannya. Hanya pada awal tahun 1860-an berdiri sebuah pabrik di Fatuahi-Dili yang mengolah cendana menjadi minyak wangi mahal. Tetapi distribusinya ke mana tidak ada data yang menjelaskan. Dugaan penulis minyak wangi tersebut

langsung dilempar ke pasar internasional melalui Singapura.

Berdasarkan data dan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa cendana masih tetap menjadi harapan salah satu komoditi andalan ekspor Timor Timur. Operasi pabrik tersebut perlu dilanjutkan tetapi perlu mempertimbangkan keuntungan yang dibagikan kepada masyarakat Timor Timur.

Di lain pihak perlu menghindari pola eksploitasi cendana Timor Timur ala kolonialis Portugis yang tidak memperhatikan unsur kelanjutan hidup pohonnya sendiri. Perlu diadakan penanaman kembali dan peremajaan hutan cendana yang secara alamiah telah tumbuh di sana. Pola peremajaannya bisa mengikuti pola peremajaan kopi yang dilaksanakan sekarang dengan anggaran miliaran rupiah.

Masih banyak potensi pertanian yang perlu diungkapkan tetapi supaya kajian ini tidak bertele-tele penulis mempersilahkan sidang pembaca untuk memeriksa pada berbagai penerbitan Kantor Statistik Timor Timur atau sumber lain.

Pertambangan

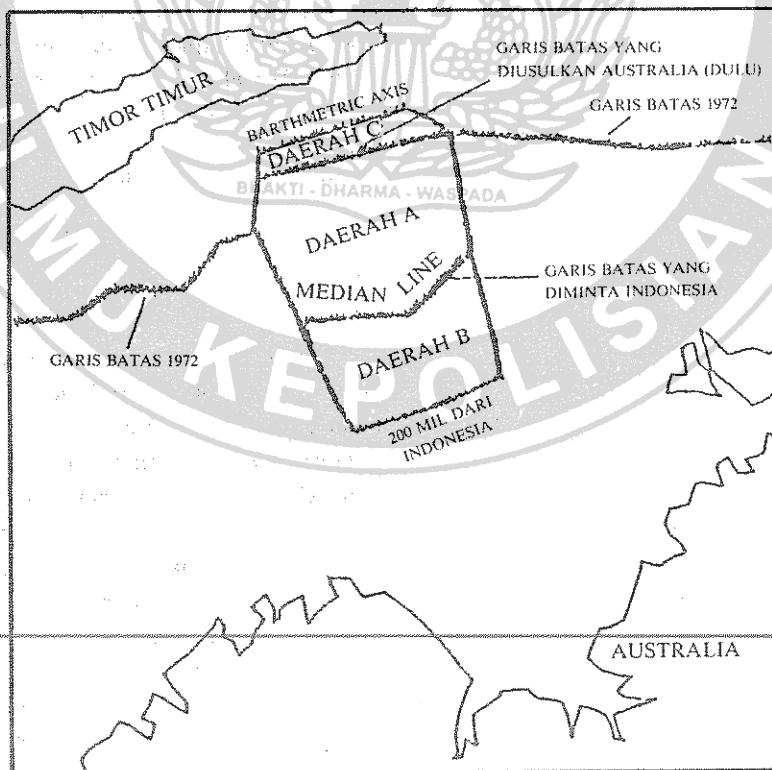
Sepanjang tahun 1989 dan 1990 salah satu diskusi publik Indonesia yang hangat adalah negosiasi Perjanjian Celah Timor (*Timor Gap*) antara Indonesia dan Australia. Celah yang diperkirakan menyimpan cadangan minyak 500 juta barrel menurut perkiraan hati-hati atau 5 miliar barrel minyak dan gas alam menurut perkiraan optimistik (Usman, 1986: 990) itu terletak persis di daerah pantai selatan Timor Timur. Jumlah ini walaupun hanya menurut perkiraan seismis termasuk salah satu dari 25 ladang minyak terbesar di dunia. Oleh karena

itu negosiasi itu menjadi menarik dan rumit. Pertama, ia mengandung dimensi internasional penyatuan Timor Timur dengan Indonesia yang belum tuntas menurut PBB. Kedua, kandungan minyak itu sendiri yang besar sehingga kedua pihak yang terlibat negosiasi cenderung ingin mendapat porsi yang besar atau menarik keuntungan politis. Ketiga, hasil negosiasi itu sendiri yang dinilai timpang karena merugikan kepentingan Indonesia secara ekonomis. Walaupun secara politis Indonesia beruntung karena negosiasi dan perjanjian itu memiliki makna penguatan *de jure* Australia atas penyatuan Timor Timur dengan Indonesia. Penentang utama isi perjanjian itu adalah Profesor Herman Johannes, mantan Rektor Universitas Gajah Mada.

Namun demikian perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Gareth Evans dalam pesawat di atas Celah Timor pada bulan Desember 1989 itu sudah diratifikasi oleh DPR Indonesia pada bulan yang sama tahun 1990.

Perjanjian itu membagi Celah Timor menjadi tiga daerah pengelolaan (A, B dan C) seperti terlihat dalam gambar berikut:

1. Daerah A akan dikelola secara bersama antara Indonesia dan Australia dengan pembagian hasil yang sama.
2. Daerah B dikelola oleh Australia dan akan memberikan hasil pajak sewa sumber daya kepada Indonesia sebanyak



10% yang dikalkulasi berdasarkan pajak perusahaan.

3. Daerah C dikelola oleh Indonesia dan membayar pajak 10% pajak pendapatan (*Contractor's Income Taxes*) perusahaan minyak yang beroperasi di daerah C (*Treaty Between Indonesia and Australia ... 1990:7*).

Argumentasi Profesor Yohanes adalah isi perjanjian tersebut telah merugikan Indonesia karena diperkirakan daerah C tidak ada minyaknya dan sebaliknya dengan daerah B. Oleh karena itu sebaiknya hasil pembagian pengelolaan Celah Timor itu dibagi 2 saja agar bisa lebih adil (*Petroleum and Mining Report, January 12, 1990*).

Terlepas dari isi perjanjian tersebut dapat dilihat bahwa Timor Timur memiliki potensi minyak dan diharapkan bila kelak dieksploitasi akan menaikkan kemampuan penerimaan daerah Timor Timur. Mogamoga peningkatan penerimaan tersebut juga dinikmati oleh masyarakat Timor Timur yang sudah banyak menderita karena potensi alamnya sendiri sejak dahulu kala.

Dalam kerangka demikian adalah relevan mengusulkan agar basis operasi Otoritas Bersama Pengelolaan Celah Timor dipusatkan di Timor Timur, tepatnya di daerah pesisir pantai seperti Aliambata (Uatu-Lari) atau Suai yang langsung menyentuh wilayah tersebut, bukan di Kupang atau Jakarta yang jauh dari Celah Timor.

Post Keterbukaan

Bagi masyarakat Timor Timur tanggal 1 Januari 1989 adalah tanggal istimewa karena pada saat itulah Timor Timur dinyatakan terbuka dan mengizinkan masyarakat bepergian baik dalam Timor Timur maupun ke

luar daerah itu tanpa membawa surat izin jalan. Implikasi ketertutupan selama kurang lebih 14 tahun itu telah menimbulkan berbagai masalah. Antara lain naiknya pengangguran terdidik (*Kompas, 2 Juli 1988*) karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan kurang bebasnya petani menjual hasil produksinya. Kegiatan ekonomi selama ini lebih banyak digerakkan oleh anggaran pemerintah di sektor publik, sedangkan sektor swasta kurang partisipasinya akibat ketertutupan dan kesan Timor Timur kurang aman.

Kini sesudah dua tahun keterbukaan itu berjalan bagaimana hasilnya?

Terlalu dini untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan hanya dalam kurun waktu dua tahun, tetapi harus diakui bahwa terjadi perubahan pola berpikir masyarakat. Dunia mereka bukan hanya di Timor Timur tetapi di seluruh Indonesia. Perasaan mereka lega oleh karena terlepas dari "sangkar emas". Sebuah kemerdekaan bergerak sudah dicapai.

Tetapi yang paling penting keterbukaan tidak hanya terbatas pada penghapusan surat izin jalan tetapi harus bersifat multi-dimensional. Paling tidak ada tiga aspek bila sebuah daerah atau negara disebut terbuka. Pertama, aliran manusia yang bebas keluar masuk daerah tersebut. Kedua, aliran barang dan jasa melalui pelabuhan laut dan udara Dili yang bebas kecuali yang bertentangan dengan hukum nasional. Ketiga, jaminan keluar masuk modal di daerah itu.

Aspek pertama keterbukaan Timor Timur sudah tercapai dengan hapusnya surat izin jalan. Tetapi aspek kedua dan ketiga masih merupakan masalah.

Belum ada data yang menunjukkan bebas keluar masuknya barang dan jasa serta modal dari dan ke Timor Timur. Namun ini

indikatornya dapat dilihat dari bebasnya masyarakat menjual barangnya ke mana saja yang diinginkan asal menguntungkan mereka. Kedua, impor barang-barang tidak dimonopoli oleh perusahaan tertentu yang bisa mengakibatkan mahalannya harga. Keterbukaan dalam konteks aspek kedua dan ketiga harus berjalan sesuai dengan mekanisme harga. Sedangkan peranan pemerintah cukup mengawasi agar salah satu pihak tidak dirugikan.

Berbicara mengenai aliran modal di Timor Timur cukup memprihatinkan. Sebab dana sekian miliar yang telah diperuntukkan pada Timor Timur ternyata membawa dampak negatif cukup besar, yaitu ketergantungan pembangunan pada pemerintah pusat yang makin besar. Banyaknya pejabat, pegawai pemerintah dan buruh yang berasal dari luar Timor Timur menyebabkan aliran modal deras keluar dari Timor Timur karena mengirim kepada keluarga dan handai taulan di kampung halaman mereka. Ibarat bola yang dilempar membentur tembok dan terpental keluar Timor Timur terutama Denpasar dan Surabaya serta Jakarta. Kemudian pembangunan yang cukup pesat itu meningkatkan pula kebutuhan konsumsi masyarakat. Sayang hal ini tidak diimbangi dengan produksi lokal sehingga kenaikan kebutuhan tersebut harus dipenuhi dari impor. Di samping itu kebutuhan untuk pembangunan pun harus diimpor dari luar daerah. Bidang konstruksi baik jalan maupun bangunan seluruh kebutuhannya diimpor kecuali batu dan pasir. Akibatnya bisa diduga uang yang seharusnya berputar di Timor Timur harus dikirim keluar untuk membeli barang kebutuhan pokok dan pembangunan fisik. Sehingga efek multipliernya tidak berjalan.

Teoretisnya bila sebuah daerah yang

mampu memproduksi dan mengonsumsi barangnya secara murah dan kebutuhan impornya sedikit, efek multipliernya akan besar. Karena dana yang ada itu bisa ditanam kembali dalam usaha produktif lain. Sehingga makin banyak uang yang berputar di daerah itu, makin banyak usaha produktif yang tercipta dan makin banyak pula orang yang menikmatinya, mungkin dalam bentuk upah, barangnya yang terjual atau sejenisnya.

Dengan demikian perlu dirancang kebijakan investasi khusus oleh pemerintah agar menarik modal masuk ke Timor Timur atau paling tidak mempertahankan dana yang sudah masuk. Insentif khusus seperti keringanan pajak dan kemudahan prosedur untuk investasi. Penulis masih teringat ucapan pengusaha kenamaan Indonesia, Sofyan Wanandi pada diskusi mengenai Prospek Ekonomi Timor Timur dengan pemrasaran Gubernur Timor Timur beberapa waktu lalu di CSIS, Jakarta: "Batam saja diberi kemudahan macam-macam mengapa Timor Timur tidak?"

Strategi Pemerataan dan Partisipasi

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian tentang makna pembangunan, bahwa pada mulanya orang tergiur oleh hasil-hasil strategi pertumbuhan tetapi kemudian mereka juga kaget dan bingung dengan efek sampingan yang ditimbulkannya. Sejarah pembangunan bangsa-bangsa Dunia Ketiga mengatakan bahwa akibat penerapan strategi pertumbuhan telah menimbulkan konsentrasi kekayaan di tangan sebagian kecil orang, kemiskinan berjalan secara evolusioner dan alienasi masyarakat lapisan bawah dalam riuh rendahnya segala upacara

pembangunan seperti peletakkan batu pertama, peresmian jembatan dan kantor oleh pejabat pemerintah. Di sisi lain ada ketergantungan yang semakin tinggi pada bantuan luar negeri dan kerusakan lingkungan.

Bila kita amati secara cermat pembangunan Timor Timur selama kurang lebih 15 tahun itu juga terjadi gejala-gejala seperti diuraikan di atas. Walaupun belum ada hasil penelitian tetapi yang jelas ada ketergantungan yang sangat tinggi terhadap keuangan pemerintah pusat. Sedangkan konsentrasi kekayaan masih samar-samar. Gejala kurangnya partisipasi masyarakat menjadi nyata dengan adanya pengangguran, kurangnya tenaga ahli asli Timor Timur yang bekerja di eselon atas pemerintahan daerah. Selain itu pembangunan yang terkesan tergesa-gesa itu telah melahirkan dikotomi antara pendatang dan penduduk asli. Pendatang lebih gesit dan terdidik, sedangkan penduduk asli sebaliknya.

Oleh karena itu kini saatnya kita adakan evaluasi kritis konstruktif terhadap pembangunan Timor Timur dan berusaha mencari kombinasi strategi yang sesuai dengan kondisi lokal sekaligus mengundang partisipasi masyarakat. Era pembangunan dengan strategi pertumbuhan sebagai justifikasi penyatuan Timor Timur dengan Indonesia sudah lewat. Persoalan relevan sekarang adalah pembagian hasil-hasil pembangunan secara merata kepada setiap kelompok anggota masyarakat. Strategi baru ini harus mampu menarik partisipasi masyarakat, mengurangi ketergantungan yang makin besar terhadap dana dari pusat serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Tidak perlu terlalu menguber pertumbuhan yang bisa menjadi bumerang.

Kondisi utama yang harus diciptakan dengan penerapan strategi baru itu adalah membangun untuk menciptakan kepercayaan diri masyarakat Timor Timur dan menghapus trauma perang sipil yang masih membekas sampai sekarang. Dengan kata lain strategi baru itu harus bisa menumbuhkan harga diri masyarakat Timor Timur yang terinjak-injak selama hampir lima abad di bawah pemerintah kolonial (totaliter) Portugal. Pembangunan harus membuat mereka tuan di daerah sendiri.

Dalam kerangka semacam itu penulis mempunyai beberapa pikiran pragmatis mengenai kombinasi strategi yang (mungkin) bisa menjamin atau paling tidak menimbulkan dampak-dampak negatif strategi pertumbuhan.

Pertama, pertumbuhan yang tinggi perlu diarahkan kepada sektor yang memiliki kaitan terpanjang, mampu menyerap banyak tenaga kerja dan bahan baku lokal seperti pertanian dan konstruksi. Untuk sektor pertanian tidak perlu buru-buru menerapkan mekanisasi pertanian, tetapi cukup memberikan pendidikan praktis yang siap pakai bagi petani atau petani potensial. Muatan kurikulum pendidikan ini meliputi pengolahan sawah yang produktif secara manual, pencetakan sawah baru yang efektif atau pembukaan ladang dan kebun baru. Begitu juga pendidikan mengenai bagaimana cara tawar-menawar membentuk harga secara menguntungkan. Untuk menampung hasil produksi petani pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana ekonomi seperti pasar yang dekat dengan lokasi produksi petani, informasi harga standar dan seterusnya. Peran lain pemerintah adalah bertindak sebagai wasit untuk menjaga proses tawar-menawar itu tidak merugikan salah satu pihak.

Untuk bidang konstruksi perlu dirancang pembangunan rumah atau kantor dengan bahan-bahan lokal seperti batu bata. Tidak perlu diimpor lagi seng. Daerah Timor Timur iklimnya panas sehingga tidak cocok dengan seng yang hanya menambah panas dan mahal lagi. Jadi perlu didorong produksi batako lokal.

Kedua, meniru Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy*) Malaysia yang memberikan kesempatan lebih luas kepada golongan bumiputra dalam industri dan perdagangan. Walaupun kebijakan ini kurang populer tetapi cukup baik dipertimbangkan untuk diterapkan di Timor Timur sesudah keterbukaan. Karena persaingan antara kaum pendatang dengan penduduk asli makin tajam. Secara operasional dapat dimulai dengan pengembangan industri kecil dan memperkuat pengusaha lokal melalui fasilitas perkreditan dengan bunga yang murah.

Barangkali kebijakan ini bisa menjadi pilot proyek (percobaan) bagi Indonesia secara keseluruhan yang juga sedang menghadapi masalah pemerataan dan partisipasi golongan miskin dalam pembangunan.

Ketiga, membiarkan aliran barang dan jasa melalui pelabuhan laut dan udara Dili secara bebas kecuali melawan hukum nasional. Menghapus monopoli dan monopsoni dalam perekonomian Timor Timur. Biarkan para petani menjual produknya kepada siapa saja dan di mana saja asalkan menguntungkan mereka.

Keempat, pengeluaran pemerintah ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan transportasi umum.

Kelima, pengembangan sektor pariwisata guna mendatangkan devisa bagi daerah.

Pembangunan Timor Timur dalam Konteks IBT

Letak Timor Timur di kawasan Indonesia Bagian Timur (IBT) membuat daerah ini ikut menjadi perhatian manakala berbicara mengenai pembangunan IBT atau sebaliknya berbicara mengenai Timor Timur sedikit banyak menyinggung IBT. Mengingat luasnya kawasan IBT ulasan pada bagian ini hanya akan terbatas pada kaitan Timor Timur dengan dua propinsi tetangga (NTT dan Maluku). Di sisi yang lain dekatnya Timor Timur dengan Australia apalagi adanya Perjanjian Celah Timor maka akan diulas juga sedikit kaitan ekonomi Timor Barat, Timor Timur dan Australia Utara.

Maluku-NTT-Timor Timur

Ketiga propinsi di atas terkait secara geografis. Walaupun antara Maluku dengan kedua propinsi lain tidak ada perbatasan darat tetapi secara substansial bisa diciptakan satu sub-zona ekonomi yang menguntungkan ketiganya. Perlu dibuka jalur pelayaran Kupang-Dili-Ambon bolak-balik agar membuka isolasi kepulauan Maluku. Pertambahan kapal laut yang khusus melayari rute tersebut sangat mendesak di samping pelayaran perintis yang kini sudah dijalankan oleh KM Kelimutu dan KM Tatamailau. Penulis yakin dengan terhubungnya ibukota ketiga propinsi tersebut dan terbukanya isolasi kepulauan Maluku pasti akan menciptakan peluang bisnis baru.

Maluku dengan laut dan hutan sagunya bisa berspesialisasi dalam produksi ikan dan sagu. Timor Timur dengan beras, kopi dan jagung berspesialisasi dalam produksi ketiga komoditi tersebut. Sedangkan NTT berspesialisasi dalam ternak dan jagung serta apel.

Berdasarkan spesialisasi tersebut ketiga propinsi itu bisa melakukan perdagangan yang saling menguntungkan.

Biaya investasi untuk armada kapal baru mungkin mahal tetapi perlu dipertimbangkan dalam konteks pembangunan IBT secara keseluruhan. Peran itu perlu dipikul oleh pemerintah melalui dana APBN. Begitu tercipta peluang bisnis swasta langsung diajak serta. Apalagi sudah ada beberapa penanaman modal dalam negeri di kawasan tersebut seperti rumput laut dan mutiara.

Bila zone perdagangan antara ketiga propinsi itu sudah tercipta maka akan mengurangi ketergantungan pada impor atau ekspor barang dan jasa dari Ujung Pandang, Denpasar apalagi Surabaya yang jauh.

Dili-Kupang-Darwin

Kawasan perjanjian Celah Timor persis terletak antara pantai selatan Timor Timur dan Australia Utara dan tidak begitu jauh dengan Timor Barat. Secara perspektif perjanjian itu membawa harapan bagi rakyat di ketiga kawasan itu. Paling tidak mereka akan kecipratan dollar apabila realisasi eksplorasi minyak itu sudah tiba. Mereka bisa berpartisipasi dengan menyediakan tenaga kerja yang murah dan sebagainya. Pertanyaannya siapkah rakyat di pulau Timor untuk menyongsong eksploitasi tersebut? Barangkali terlalu naif untuk mengatakan belum siap terutama melihat kondisi Timor Timur di pesisir pantai selatan yang masih bergulat dengan keamanan dan prasarana jalan yang masih belum ada apalagi sarana transportasi yang memadai. Oleh karena itu pemerintah Timor Timur perlu memberikan prioritas pada pembangunan berbagai prasarana di daerah tersebut. Pe-

nulis yakin kita bisa memetik keuntungan ekonomis dari eksploitasi minyak di Celah Timor.

Dili-Kupang-Darwin bisa dikembangkan menjadi satu kawasan kerja sama segitiga yang lain di samping NTT-Timor Timur-Maluku yang menguntungkan secara mutualistis. Timor Timur dengan pelabuhan udara Baucau yang luas, pantai-pantai yang masih alami, gedung-gedung peninggalan Portugis dan gua-gua peninggalan Jepang pada Perang Dunia II merupakan daya tarik tersendiri bagi turis Australia. Lebih murah berlibur ke Timor atau Bali daripada ke Australia Selatan yang sangat mahal. Begitu juga dengan kerajinan Timor. Dengan kata lain Timor Timur dan Timor Barat bisa diuntungkan dengan wisatawan Australia. Dan di lain pihak Australia Utara bisa memanfaatkan buruh murah pulau Timor bagi industri mereka.

Dengan demikian adalah penting dan segera bagi pemerintah daerah Timor Timur untuk membuka pelabuhan udara Baucau dan menghubungkannya dengan Darwin. Sehingga tercipta jalur penerbangan segitiga Baucau-Dili-Kupang-Darwin.

Selain itu pelabuhan udara Baucau yang bisa didarati pesawat DC-9 bisa dimanfaatkan untuk transit bagi penerbangan dari dan ke negara Pasifik Selatan dan Australia.

Catatan Penutup

Harus diakui bahwa pembangunan di daerah Timor Timur sudah membawa kemajuan-kemajuan. Hal ini tidak lain akibat penerapan strategi pertumbuhan ekonomi. Tetapi di samping kemajuan-kemajuan itu

juga telah melahirkan efek sampingan berupa ketergantungan yang makin besar terhadap dana pemerintah pusat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan dikotomi penduduk asli dan pendatang yang cenderung melebar.

Oleh karena itu perlu dipikirkan pene-

rapan strategi pemerataan yang bisa mengundang partisipasi masyarakat berdasarkan potensi daerah tersebut. Dalam konteks demikian perlu diadakan zona kerja sama ekonomi NTT-Timor Timur dan Maluku. Begitu juga zona kerja sama ekonomi antara Timor dengan Australia untuk menyongsong eksploitasi Celah Timor.

BIBLIOGRAFI

- BKPM Timor Timur. *Potensi Daerah Timor-Timur*. Dili, 1987.
- , *Timor, III Plano de Fomento para 1968-1973* (Timor, Rencana Pembangunan Tahap III 1968-1973). Lisboa: Imprensa Nacional.
- Carrascalao, Mario Viegas. "Investment Prospect in East Timor Province", 1990, Tidak dipublikasikan.
- Duarte, Teofilo. *Timor, Ante-Camara do Inferno?* (Tidak Ingin Timor Menjadi Neraka). Lisboa: Famaciao Tip Minerva de G. Sousa, 1930.
- Esmara, Hendra. *Politik Perencanaan Pembangunan: Teori, Kebijakan dan Prospek*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Felgas, Helio A. Esteves. *Timor Portugues*. Lisboa: Agencia Geral do Ultramar, 1956.
- Johanes, Herman. "Let the Public Opinion Judge the Controversial Statements on Timor Gap." *Petroleum Mining Report* 5 Vol. XV (January 1990).
- , Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang Wilayah Kerjasama antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara, 1990.
- Kantor Statistika dan BAPPEDA Timor Timur. *Pendapatan Regional Propinsi Timor Timur 1983-1988* (Tabel-tabel pokok), Dili, 1990.
- Kantor Statistik dan BAPPEDA Timor Timur. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Timor Timur*. Dili, 1986.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Perjanjian Indonesia-Australia di Celah Timor", 1990. Tidak dipublikasikan.
- Saldanha, Joao Mariano de Sousa. "Profil Ekonomi Regional Timor Timur." Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 1988.
- , "Tiga Belas Tahun Timor Timur, Tantangan Mengelola Penyesuaian Ganda," *Kompas*, 5 Agustus 1989.
- , "East Timor Must Give Priority to Industry and Trade," *Jakarta Post*, 22 September 1989.
- Soesastro, M. Hadi. "East Timor Question of Economic Viability" dalam *Unity and Diversity, Regional Economic Development in Indonesia Since 1970*, ed. Hall Hill. New York: Oxford University Press.
- Temenggung, Syafruddin Arsyad. "Tolok Ukur Pembangunan." *Kompas*, 19 Januari 1991.
- Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Usman, Asnani. "Timor Gap dalam Penetapan Landas Kontinen Indonesia-Australia," *Analisa 11* (November 1986).
- Wie, Thee Kian. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan: Beberapa Pendekatan Alternatif*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- , *Timor*, Pequena Monografia. Lisboa: Agencia Geral do Ultramar, 1956.

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN

Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA

I. KERJASAMA EKONOMI

- A. Konperensi Internasional ASEAN
- B. Kerjasama ASEAN dalam Menghadapi Situasi Global
- C. Pemanfaatan Potensi Ekonomi ASEAN
- D. Promosi Makanan Laut ASEAN

II. KERJASAMA NON-EKONOMI ASEAN

- A. Kerjasama Kebudayaan dan Informasi
 1. Pembentukan Himpunan Penerbit Surat Kabar ASEAN
 2. Rencana Pembangunan Pabrik Kertas ASEAN
 3. Pertemuan Tiga Menteri Agama ASEAN
 4. Dialog Sastrawan ASEAN

B. Kerjasama Kesehatan

1. Kerjasama Bidang Farmasi
2. Kongres Infertilitas ASEAN ke-1

III. KERJASAMA NON-PEMERINTAH

- A. Dialog Tahunan Antar Parlemen ASEAN (AIPO)
- B. Kerjasama Pemuda ASEAN
 1. Konperensi Pemuda ASEAN
 2. Seminar Kepemimpinan Mahasiswa ASEAN

IV. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

- Hubungan ASEAN-Uni Soviet

I. KERJASAMA EKONOMI

A. KONPERENSI INTERNASIONAL ASEAN

Konperensi Internasional ASEAN dengan tema "The ASEAN Countries and the World Economy: Challenge of Change" berlangsung di Bali tanggal 3-5 Maret 1991 dihadiri oleh Presiden Soeharto, PM Malaysia, Mahathir Mohamad, PM Singapura, Goh Chok Tong, Sultan Brunei Darussalam, Hassanah Bolikiah, Mantan Menlu AS, Henry Kissinger, anggota Parlemen Jepang, Michio Watanabe serta sejumlah pakar dari dalam maupun luar negeri.

Dalam pertemuan dengan PM Mahathir Mohamad di Istana Merdeka, tanggal 1 Maret 1991, Presiden Soeharto mengatakan bahwa: (1) gagasan PM Mahathir Mohamad tentang pembentukan Kelompok Ekonomi Asia Timur (EAEG) perlu ditelaah oleh pejabat tinggi kedua negara, termasuk dengan pejabat tinggi ASEAN lainnya; (2) ia memahami pemikiran PM Mahathir Mohamad itu (*Kompas*, 2-3-1991).

PM Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan dalam jumpa pers di Wisma Negara tanggal 2 Maret 1991 bahwa: (1) gagasan pembentukan EAEG yang dilontarkan Malaysia tahun 1990 merupakan upaya ASEAN setelah mendapat dukungan negara-negara ASEAN; (2) tujuan dibentuknya EAEG ialah mewujudkan perdagangan bebas dan bukan untuk menumbuhkan Masyarakat Ekonomi bagi negara-negara Asia Timur; (3) apabila konsep EAEG diterima negara-negara Asia Timur seperti yang telah diterima ASEAN, maka akan terbentuk suatu badan yang memungkinkan perundingan secara terarah; (4) dengan EAEG, negara ASEAN lebih dihormati, jika akan mengadakan pembicaraan dengan Masyarakat Eropa dan AS mengenai soal GATT; (5) RRC dan Vietnam tampaknya tidak menolak gagasan EAEG tetapi Jepang masih ragu-ragu dengan gagasan EAEG; (6) EAEG tidak bersifat ketat seperti halnya MEE; (7) jika EAEG berjalan, diharapkan dapat meningkatkan perdagangan di antara negara-negara Asia Timur; (8) anggota EAEG akan terdiri dari negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan dan sebagainya (*Antara*, 2-3-1991); (9) EAEG tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu blok perdagangan tersendiri dan bukan untuk membentuk suatu komunitas ekonomi yang sifatnya tertutup, seperti MEE dan Blok Perdagangan Amerika Utara; (10) EAEG justru ingin mengkalkikan prinsip perdagangan bebas di dunia (*Kompas*, 3-3-1991).

Jusuf Wanandi mengatakan kepada wartawan Antara di Nusa Dua, Bali tanggal 2 Maret 1991 bahwa: (1) kondisi dinamis yang terjadi di ASEAN dan kawasan Asia Pasifik dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai salah satu langkah bahwa ASEAN harus bersiap-siap menjawab tantangan baru internasional akhirnya Perang Teluk; (2) tujuan konperensi adalah untuk menjawab tantangan baru dan mendapat umpan balik dari pembicara luar negeri tentang KTT ASEAN 1992 di Singapura; (3) kehadiran para peserta swasta dari kawasan Asia Pasifik dalam konperensi memberikan kesempatan kepada mereka supaya lebih banyak mengetahui tentang ASEAN dan dapat menggalang kerjasama ekonomi di kawasan ini; (4) perubahan-perubahan di kawasan Eropa sangat penting untuk diperhatikan; (5) forum kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC) penting untuk menjawab tantangan Pasar Tunggal Eropa dan Pasar Bebas Amerika-Kanada; (6) kawasan Asia Pasifik jauh stabil dan dinamika ekonominya lebih maju dibandingkan Eropa (*Antara*, 3-3-1991); (7) pembentukan EAEG tidak ada masalah; (8) EAEG bukan suatu badan internasional atau organisasi internasional, tetapi merupakan suatu caucus, forum konsultasi atau forum dialog; (9) ASEAN masih lemah untuk menghadapi percaturan perekonomian dunia yang kini cenderung menuju ke arah regionalisme dan proteksionisme dengan terbentuknya Pasar Tunggal Eropa dan blok perdagangan Amerika-Kanada (*Suara Karya*, 6-3-1991).

Presiden Soeharto mengatakan pada pembukaan Konperensi Internasional itu bahwa: (1) Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus memberikan arti penting dan mendorong peningkatan kerjasama ekonomi bilateral, regional dan multilateral; (2) Indonesia menegaskan bahwa kerjasama ekonomi regional tidak boleh menjurus ke arah pembentukan blok perdagangan tertutup, dan juga tidak dimaksudkan untuk menandingi kelompok lain, tetapi untuk saling menunjang dengan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi regional lainnya; (3) perekonomian dunia semakin terintegrasi dan mengarah pada globalisasi; (4) perkembangan tersebut memerlukan peningkatan usaha untuk membangun sistem perdagangan internasional yang terbuka dalam persaingan yang wajar, jujur dan adil; (5) di samping itu terlihat pula kecenderungan pembentukan blok-blok perdagangan. Misalnya Pasar Bersama Eropa dan Pasar Bebas Amerika-Kanada; (6) Indonesia kecewa dengan tidak tercapainya kesepakatan dalam Putaran Uruguay. Tetapi Indonesia tetap mengharap-

kan dilanjutkannya perundingan Putaran Uruguay, dan akan terus mengupayakan langkah konstruktif untuk menunjang keberhasilannya; (7) konperensi di Bali berlangsung pada saat dunia sedang diliputi ketidakpastian dan keraguan; (8) pada tahun-tahun terakhir ini terjadi proses peredaan perang dingin antara negara-negara adidaya dan surutnya pertentangan dan persaingan yang didasarkan atas ideologi. Keadaan tersebut memberikan harapan kepada dunia untuk bergerak menuju masa depan yang diwarnai oleh perdamaian, kerjasama dan persahabatan; (9) semua bangsa perlu mengambil langkah bersama untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah setelah gencatan senjata berlangsung; (10) konperensi di Bali agar mampu membahas masalah-masalah yang rumit dan memahaminya secara mendalam, sehingga mampu mengantisipasi perekonomian dunia di masa mendatang; (11) negara-negara ASEAN telah sepakat untuk mewujudkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi regional yang tangguh dan maju; (12) negara-negara ASEAN tetap terbuka, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas bentuk-bentuk kerjasama ekonomi regional yang lebih luas, selama tidak melarutkan ASEAN itu sendiri; (13) meskipun ASEAN pada awalnya diciptakan sebagai wadah kerjasama ekonomi dan sosial budaya, tetapi dalam perkembangannya ASEAN juga mampu menggalang kerjasama politik, sebab sebagai negara di Asia Tenggara, ASEAN ikut bertanggung jawab atas terpeliharanya perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan itu; (14) keberhasilan dalam kerjasama politik di antara negara-negara ASEAN telah memantapkan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara pada gilirannya mendukung usaha pembangunan ekonomi, baik nasional maupun regional; (15) kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara meningkat pesat, dan sebagian besar negara di kawasan ini mengarah pada ekonomi terbuka serta menempuh kebijaksanaan perdagangan, industri dan keuangan yang didasarkan pada mekanisme pasar terkendali untuk menjamin efisiensi dalam alokasi sumber-sumber daya (*Kompas*, 4-3-1991); (16) ASEAN masih dapat memperkuat dan menyempurnakan kerjasamanya untuk memberi iklim yang lebih baik dan menarik bagi pengembangan kegiatan ekonomi dunia usaha swasta; (17) untuk mempercepat pengembangan industri patungan dan peningkatan investasi hambatan-hambatan yang masih ada agar dikurangi atau dihapus; (18) perlu dijajaki kebijaksanaan untuk mendorong perdagangan dan investasi dalam produk tertentu melalui tarif efektif yang berlaku sesama ASEAN; (19) pengaturan perdagangan preferensi perlu disederhanakan, dipercepat pelaksanaannya

dan diperluas ruang lingkungannya. Selain itu hambatan-hambatan non-tarif perlu dihapuskan (*Suara Pempbaruan*, 4-3-1991).

PM Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan: (1) ASEAN agar memperkuat diri sebelum dapat mempengaruhi arah ekonomi dunia, dan sukses yang dicapai sekarang ini jangan dipandang sebagai hal yang seharusnya terjadi (*taken for granted*); (2) tiga dasar yang harus diperkuat adalah perdamaian, kerukunan dan jalinan kerjasama ekonomi; (3) ASEAN harus melancarkan prakarsa-prakarsa yang berkaitan dengan usaha untuk meluaskan tingkat kerjasama ekonomi di antara anggotanya; (4) ASEAN hendaknya beraspirasi untuk mencapai tingkat kinerja (*performance*) pada front ekonomi seperti yang sudah tercapai dalam bidang kerjasama politik dan diplomatik; (5) pada KTT ASEAN ke-4 mendatang di Singapura banyak hal yang harus dikerjakan; (6) diperlukan satu elemen baru dalam ASEAN, yaitu Pertemuan Informal Para Kepala Negara ASEAN yang diselenggarakan secara reguler dalam suasana santai di antara pertemuan-pertemuan puncak resmi; (7) EAEG bukan dimaksudkan sebagai blok perdagangan formal; (8) EAEG diakui sebagai cara yang sah bagi sesama negara tetangga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sehingga perlakuan khusus dan penghilangan hambatan-hambatan perdagangan dalam sebuah kelompok merupakan hal yang sah dan benar; (9) suatu pengelompokan menjadi suatu blok perdagangan bila negara-negara anggotanya tidak diperbolehkan merundingkan sendiri syarat-syarat perdagangan dengan pihak luar (*Antara*, 5-3-1991); (10) kita tidak mampu untuk menghentikan kecenderungan perdagangan internasional yang makin dikontrol dan diatur; (11) demi mempertahankan perdagangan bebas di Asia Timur kita harus bicara dengan satu suara; (12) EAEG tidak melawan prinsip GATT atau bertentangan dengan keanggotaan APEC; (13) EAEG harus memiliki pengetahuan teknologi dan ketrampilan yang dapat dipakai sebagai alat dalam perundingan dengan blok perdagangan Amerika dan Eropa; (14) anggota ASEAN mendukung konsep EAEG; (15) ASEAN tinggal mengusulkan EAEG secara formal kepada negara-negara Asia Timur; (16) perdagangan dunia akan memperoleh manfaat dari EAEG (*Kompas*, 5-3-1991).

PM Singapura, Goh Chok Tong, mengatakan: (1) masa kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN yang sifatnya hanya ke dalam lingkungan sendiri sudah lewat; (2) ASEAN kini harus memasuki tahapan yang baru untuk lebih melihat ke luar atau yang bersifat ker-

jasama kompetitif; (3) pemerintah-pemerintah negara ASEAN hendaknya memberi fasilitas bagi investasi-investasi generik di kawasan ini dan bukan untuk menghalanginya; (4) jenis-jenis investasi itu sebaiknya ditentukan oleh permintaan pasar dan bukan oleh para birokrat; (5) strategi kompetitif itu sangat penting dalam kaitan dengan kecenderungan perekonomian dunia; (6) kecenderungan yang akan berdampak paling besar atas pemikiran strategis ASEAN dalam bekerjasama adalah pembentukan kelompok-kelompok ekonomi di mana-mana; (7) MEE akan menjadi Pasar Tunggal 1992 dan mungkin beberapa negara Eropa Timur diijinkan untuk bergabung jika mereka berhasil mengubah dirinya menjadi ekonomi pasar bebas; (8) pembentukan Pasar Bebas AS-Kanada dan kemudian diikuti oleh Meksiko, akan merugikan ASEAN apabila industri di dua kelompok itu tidak efisien dan hanya dapat bersaing karena ditolong oleh subsidi dan hambatan perdagangan; (9) wajar jika ASEAN khawatir terhadap kecenderungan-kecenderungan ekonomi internasional tersebut; (10) untuk menanggapi keadaan tersebut ASEAN harus lebih kompetitif dan menuntut untuk bermain pada tingkat yang sama; (11) ASEAN harus bermain dalam satu tim yang besar, misalnya mengikatkan diri dengan kekuatan-kekuatan ekonomi Asia Pasifik, melalui bentuk-bentuk seperti EAEG dan APEC; (12) apabila ASEAN tidak mengikuti kecenderungan kerjasama ekonomi melalui pengelompokan-pengelompokan ekonomi, maka mungkin industri Malaysia, Muangthai dan Indonesia yang sudah siap lepas landas akan mengalami kegagalan, sementara yang sudah lebih dulu lepas landas akan mengalami kerusakan mesin di udara (*Kompas*, 5-3-1991).

Menu Ali Alatas, mengatakan bahwa: (1) ASEAN sebagai asosiasi sub-regional yang melihat ke luar (*outward looking*), pandangan maupun kebijakan-kebijakan ASEAN tidak boleh statis; (2) untuk memperluas kerjasama ekonomi di antara kawasan negara-negara Asia Timur, perlu dikembangkan bentuk-bentuk kerjasama yang lebih efektif; (3) ASEAN siap untuk berpartisipasi dalam APEC dan memberikan sumbangan secara konstruktif agar proses konsultatif benar-benar berkembang; (4) APEC tidak boleh diarahkan menjadi suatu blok ekonomi atau perdagangan yang tertutup (*inward looking*), namun sebaliknya harus memperkuat sistem ekonomi dan perdagangan multilateral yang terbuka di dunia; (5) APEC pada dasarnya harus menjadi forum untuk diskusi-diskusi dan konsultasi yang konstruktif mengenai masalah-masalah ekonomi; (6) kerjasama dengan APEC cukup ideal karena dapat

memisahkan soal politik dan ekonomi (*Kompas*, 5-3-1991).

Sementara itu anggota Parlemen Jepang, Michio Watanabe, mengatakan: (1) bantuan Jepang ke negara-negara ASEAN bukan merupakan bentuk imperialisme baru; (2) banyak orang ASEAN beranggapan bahwa bantuan itu memperkuat pengaruh Jepang secara politis dan ekonomis; (3) ia tidak sependapat dengan pernyataan tersebut, karenanya: (a) negara-negara ASEAN benar-benar membutuhkan bantuan-bantuan berupa *loan* dan *grant*; (b) bantuan itu tidak mengikat; (4) walaupun terjadi Perang Teluk, Jepang tidak mengurangi bantuannya (*Suara Karya*, 5-3-1991).

Duta Besar AS untuk Jepang, Michael H. Armcoist, mengatakan: (1) AS tidak setuju dengan gagasan Mahathir Mohamad tentang EAEG; (2) APEC merupakan kerjasama ekonomi yang logis di kawasan Asia Pasifik; (3) dengan adanya EAEG, APEC dikhawatirkan akan tersisih; (4) kepentingan negara-negara ASEAN akan terlayani melalui APEC daripada membentuk kelompok kerjasama ekonomi baru; (5) AS mendesak Jepang untuk lebih membuka pasar domestiknya bagi barang-barang dari negara-negara Asia Pasifik lainnya; (6) AS mendorong Jepang untuk memainkan peranan di kawasan Asia Pasifik, termasuk membantu penyelesaian masalah Kamboja dan berpartisipasi dalam pasukan perdamaian PBB (*Kompas*, 6-3-1991).

Sementara itu bekas Dubes Singapura untuk PBB, Tommy TB. Koh, mengatakan: (1) ASEAN bukan merupakan organisasi atau pengaturan keamanan regional, tetapi ASEAN merupakan faktor penting bagi stabilitas Asia Tenggara; (2) sikap saling percaya antara negara-negara ASEAN semakin berkembang, termasuk peningkatan kerjasama pertahanan bilateral di antara negara-negara ASEAN; (3) keamanan di Asia Tenggara tidak dapat dipisahkan dari Asia Timur ataupun kekuatan-kekuatan besar lainnya; (4) keanggotaan ASEAN belum lengkap. Ia mendukung usul PM Mahathir untuk memperluas keanggotaan ASEAN dengan memasukkan Myanmar, Kamboja, Laos dan Vietnam; (5) AS hendaknya tetap mempertahankan kehadirannya di kawasan Asia Tenggara (*Kompas*, 6-3-1991).

Dr. Robert A. Scalapino, mengatakan bahwa: (1) hubungan Cina dengan negara-negara di sekitarnya dipengaruhi oleh: (a) pandangan historis, di mana Cina sebagai pusat yang dikelilingi bangsa-bangsa lain yang tingkatnya lebih rendah; (b) hubungan tersebut selalu

dikaitkan dengan ideologi Cina dan digalang berdasarkan persepsinya mengenai kepentingan nasionalnya; (2) Cina kagum atas kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Jepang, tetapi Cina khawatir jika Jepang menjadi kekuatan militer; (3) Jepang memandang Cina sebagai pasar yang potensial, yang diharapkan tidak maju terlalu cepat; (4) Cina tetap mempertahankan politik dua Korea-nya; (5) hubungan Cina dengan Taiwan baru pada tingkat pendekatan, karena kepentingan ekonomi masing-masing; (6) hubungan Cina dengan ASEAN bersikap korek, karena kepentingan politik dan ekonomi masing-masing mengharuskan demikian (*Kompas*, 6-3-1991).

Presdir Prudential Asia Investments Hongkong, Dr. Victor Fung, mengatakan: (1) pada dekade 1990-an ekonomi Asia tidak lagi tergantung pada Amerika dan Eropa; (2) ekonomi Asia akan semakin kompleks mengacu sebagai kawasan yang mandiri, berubah peranannya dari pusat tenaga kerja yang murah menjadi sistem pasar yang dewasa; (3) pola saling ketergantungan ekonomi antara negara di Asia akan meningkat; (4) pada tahun 1988 untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia perdagangan intra Asia melebihi ekspor ke Amerika; (5) diperkirakan pada akhir 1990-an, perdagangan intra Asia akan mencapai 55% dari total ekspor Asia di dunia; (6) satu faktor yang menunjang interdependensi dan integrasi ekonomi Asia, adalah berkurangnya ketegangan politik dan ekonomi di antara negara Asia; (7) interdependensi itu akan terjadi melalui migrasi pabrik-pabrik; (8) prospek investasi penguasaan akan memilih bisnis jasa dengan teknologi tinggi, dan manufacturing padat modal; (9) perlu peningkatan ketrampilan tenaga kerja sebab para pengusaha mencari tenaga kerja yang trampil dalam teknologi tinggi; (10) bisnis yang akan dimasuki adalah produk *upstream* atau konsumen akhir, terutama barang yang langsung habis atau dibuang setelah pakai (*disposable*); (11) negara-negara ASEAN akan meninggalkan kebiasaan sebagai pedagang komoditi primer dan merintis industri pengolahan bahan baku atau *downstream*; (12) sumber-sumber alam di Asia akan diolah sendiri, dan dijual pada konsumen di Asia; (13) pilihan bisnis akan semakin luas dan mengikuti kemajuan budaya masyarakatnya yang diubah oleh peningkatan pendapatan dan pendidikan (*Suara Pembaruan*, 6-3-1991).

Presdir Acer Group Taiwan, Stan Shih, mengatakan: (1) pasar di Asia akan semakin kuat; (2) potensi pasar dunia dan ASEAN terhadap teknologi tinggi akan semakin naik; (3) Singapura sudah mengacu pada teknologi tinggi, dan produk sektor industrinya men-

capai 80% total produk Singapura. Malaysia akan mengejar, sementara negara-negara ASEAN lainnya mengalami kesulitan mengembangkan teknologi tinggi, karena terbatasnya *engineering*; (4) pada umumnya pengusaha ASEAN tidak berminat mengeluarkan dana untuk menumbuhkan kapabilitas *Research and Development* (R&D) yang merupakan persyaratan bagi penguasaan teknologi tinggi; (5) pada tahun 1976 Taiwan mencanangkan industri komputer sebagai strategi nasional (*Suara Pembaruan*, 6-3-1991).

Mantan Wakil Menlu AS, John C. Whitehead yang kini menjabat Presiden The Asia Society, mengatakan: (1) pertemuan di Bali merupakan konferensi terbesar peminatnya yang pernah diselenggarakan oleh The Asia Society; (2) The Asia Society merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengertian bangsa Amerika mengenai kebudayaan, sejarah dan perkembangan Asia serta mempererat komunikasi antara bangsa Asia dan AS (*Kompas*, 4-3-1991).

Mantan Menlu AS, Dr. Henry Kissinger, mengatakan: (1) ASEAN harus meredefinisikan arah; (2) dalam tatanan dunia baru, AS tidak lagi mengambil tindakan unilateral karena yang mungkin terjadi ialah sekuriti kolektif; (3) keberhasilan AS dalam Perang Teluk, disintegrasi ideologi komunis dan robohnya Eropa Timur serta Tembok Berlin, menciptakan hal baru bagi AS maupun negara-negara lain; (4) tidak mungkin bagi AS untuk menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia, karena AS tidak mempunyai kekuatan ekonomi untuk mendukung posisi itu dan masyarakat AS tidak mempunyai citra tentang identitas sebagai *super power*; (5) dalam dunia baru nanti akan terjadi bermacam-macam kepentingan yang menciptakan kekuatan perimbangan baru; (6) Perang Teluk merupakan contoh terjadinya penyatuan (*convergence*) (*Suara Pembaruan*, 4-3-1991); (7) peredaan ketegangan antara AS dan Uni Soviet serta perekonomian dunia yang semakin global menimbulkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN; (8) berakhirnya Perang Teluk juga merupakan akhir keterlibatan AS secara unilateral dalam perang di luar wilayahnya; (9) AS akan merumuskan kembali kepentingan nasionalnya (*Kompas*, 5-3-1991); (10) AS tidak berniat memainkan peranan yang penting di Asia Tenggara dan tidak mempunyai ambisi untuk menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara; (11) kawasan yang paling penting bagi AS adalah Amerika Latin, karena kawasan itu berbatasan langsung dengan AS. Sedangkan hubungan AS dengan Eropa karena sejarah (*Kompas*, 6-3-1991); (12) rencana pembentukan EAEG tidak

akan mengganggu hubungan antara AS dan ASEAN; (13) bagi AS yang paling penting, ASEAN tetap bersikap independen dan tetap menjadi suatu kawasan yang stabil; (14) kehadiran AS di kawasan Asia Tenggara adalah juga menjaga stabilitas ASEAN (*Suara Karya*, 6-3-1991).

B. KERJASAMA ASEAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SITUASI GLOBAL

Simposium Kerjasama ASEAN dalam Menghadapi Perubahan Situasi Global yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret dengan Setnas ASEAN berlangsung di Surakarta tanggal 26-27 Februari 1991.

Kabaltibang Departemen Luar Negeri, M. Singgih Hadipranoto mengatakan pada simposium itu bahwa: (1) di wilayah sekitar ASEAN hingga sekarang masih terdapat tempat-tempat yang mengandung potensi konflik; (2) selain globalisasi ekonomi yang berlangsung sejak dekade 1980-an, kerjasama ASEAN masih dihadapkan pada sejumlah kendala serius; (3) hambatan-hambatan itu akan dapat mengganggu dan memecah kohesi ASEAN, terutama masalah yang menyangkut sengketa bilateral yang masih ada di antara negara anggotanya serta persaingan perdagangan maupun persepsi ancaman; (4) untuk menghadapi tantangan itu, negara-negara anggota ASEAN harus menghilangkan rasa saling curiga; (5) salah satu sebab yang menyebabkan langkah ASEAN terkesan hati-hati adalah munculnya anggapan mengenai ASEAN sebagai proyek AS untuk mengantisipasi bubarnya NATO; (6) masalah keamanan yang ditegaskan dalam *ASEAN Concord* hanya dilakukan dalam kerangka non-ASEAN yang didasarkan atas keperluan dan kepentingan bersama (*Suara Karya*, 28-2-1991).

Sementara itu, Kepala Biro Sekretaris Nasional ASEAN, Hasan Alaydrus mengatakan bahwa: (1) ASEAN perlu segera menyempurnakan strategi yang pernah digariskan, terutama untuk mengantisipasi situasi dan perkembangan dunia tanpa harus berpaling dari usaha meningkatkan kesejahteraan, mempercepat pertumbuhan ekonomi serta membina stabilitas kawasan sebagai tujuan utama; (2) keberhasilan menghapuskan rintangan-rintangan perdagangan dan penanaman modal inter ASEAN melalui *ASEAN Preferential Trade Agreement* (APTA) maupun *ASEAN Industrial Joint Ventures* (AIJV) langkah ekonomi ASEAN tampak semakin mantap; (3) ASEAN telah dapat berbicara dengan menyatukan suara mereka dalam Putaran

Uruguay yang membicarakan masalah GATT; (4) bukan tidak mungkin apa yang terjadi di Eropa Timur dapat membawa dampak buruk yang berupa beralihnya dana investasi dan arus perdagangan negara-negara maju ke Eropa Timur (*Suara Karya*, 28-2-1991).

C. PEMANFAATAN POTENSI EKONOMI ASEAN

Dalam pertemuannya dengan Serikat Buruh Singapura tanggal 24 April 1991, PM Singapura, Goh Chok Tong, mengatakan bahwa: (1) sesama negara anggota ASEAN kini harus berupaya lebih keras untuk menyatukan kekuatan ekonomi dan sumber daya yang dimilikinya untuk lebih banyak menarik minat investor asing untuk menghadapi persaingan merebut modal asing yang sangat gencar dilakukan oleh negara-negara maju; (2) blok perekonomian Eropa dan Amerika Utara bukan hanya dibentuk untuk memperluas pasaran bersama antara negara anggotanya, tetapi juga untuk mengundang masuk investasi asing. Hal ini merupakan salah satu bentuk persaingan yang harus dihadapi ASEAN; (3) ASEAN belum dapat memanfaatkan kawasan perdagangan bebas seperti yang telah dilakukan oleh Eropa dan Amerika Utara; (4) ASEAN mempunyai kesempatan dan kemampuan kuat untuk bersaing dengan negara maju; (5) segitiga pertumbuhan atau *growth triangle* yang meliputi Johor, Riau dan Singapura merupakan lokasi yang menguntungkan bagi tiga negara ASEAN, sebab tanpa memanfaatkan segitiga pertumbuhan ASEAN, akan mengalami kemandekan; (6) pengembangan ekonomi di masa mendatang tidak dapat mengandalkan bantuan ekonomi dan pemberian GSP (Sistem Preferensi Umum) dari negara maju untuk negara berkembang, tetapi melalui pemanfaatan kekuatan ekonomi dan daya tarik agar diminati investor asing; (7) Cina, Eropa Timur, Uni Soviet dan Vietnam sedang berlomba mencari modal asing yang dimiliki Jepang, Hongkong, Singapura dan Korea Selatan (*Jakarta Post*, 24-4-1991).

D. PROMOSI MAKANAN LAUT ASEAN

Konperensi Federasi Perikanan ASEAN berlangsung di Manila tanggal 1 Maret 1991 untuk membahas patokan persyaratan restoran makanan laut di negara-negara anggota ASEAN seperti: (1) restoran itu minimal menyertakan tiga resep dari tiap negara anggota ASEAN; (2) penyediaan musik dari semua negara anggota ASEAN; (3) pengaitan hari nasional dengan ma-

kanan untuk festival atau semacam kegiatan yang menarik perhatian, khususnya negara anggota ASEAN; (4) pembentukan sebuah korporasi mengenai investasi untuk membentuk *holding company* yang akan mengelola restoran ASEAN (*Antara*, 1 Maret 1991).

III. KERJASAMA NON-EKONOMI ASEAN

A. KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMASI

1. Pembentukan Himpunan Penerbit Surat Kabar ASEAN

Ketika menerima Ketua Perhimpunan Surat Kabar Malaysia, Jusof Bador, di ruang kerjanya tanggal 22 April 1991, Menteri Penerangan Harmoko mengatakan bahwa: (1) Perhimpunan Penerbit Surat Kabar Malaysia dan Serikat Penerbit Surat Kabar Indonesia agar mengadakan pendekatan dengan pihak Singapura, Muangthai, Filipina dan Brunei untuk merencanakan pembentukan himpunan Penerbit Surat Kabar ASEAN; (2) pembentukan himpunan ini diharapkan dapat memecahkan masalah dan tantangan-tantangan di masa mendatang, terutama untuk memantapkan kebebasan pers yang bertanggungjawab di kawasan ASEAN; (3) rencana pembentukan itu jangan sampai menimbulkan kesan seakan-akan didorong oleh pihak pemerintah, tetapi harus merupakan kesadaran dari penerbit masing-masing; (4) penerbit surat kabar di wilayah ASEAN mempunyai peranan yang sangat penting untuk memperkuat perhimpunan ASEAN; (4) pembentukan perhimpunan ini akan dapat mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan penerbitan misalnya bahan baku (*Suara Pembaruan*, 23-4-1991).

2. Rencana Pembangunan Pabrik Kertas ASEAN

Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengatakan kepada pers di Bali tanggal 23 April 1991 bahwa: (1) upaya pendirian pabrik kertas koran bersama ASEAN sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kertas koran yang terus melambung di negara-negara anggotanya; (2) langkah ini diambil karena produksi kertas di dalam negeri negara-negara ASEAN tidak mampu lagi memenuhi keperluan negaranya sendiri; (3) sampai saat ini Indonesia masih mengimpor 10% dari kebutuhan total kertas korannya dari Selandia Baru, Finlandia dan Kanada; (4) jika kebutuhan kertas negara-negara

ASEAN digabungkan membutuhkan kertas yang banyak, dengan demikian perlu dibangun sebuah pabrik kertas yang representatif dengan harga yang sesuai dengan kepentingan ASEAN; (5) rencana pendirian pabrik kertas bersama akan dibahas dalam Sidang Serikat Penerbit negara-negara ASEAN di Indonesia tahun 1991, dan Indonesia diminta menjadi tuan rumah sidang pertama Serikat Penerbit itu; (6) pertemuan akan membahas masalah pengembangan dan efisiensi berbagai hal yang berkaitan dengan masalah penerbitan surat kabar (*Kompas*, 24-4-1991).

3. Pertemuan Tiga Menteri Agama ASEAN

Pertemuan tidak resmi Tahunan Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia ke-2 berlangsung di Kuala Lumpur, tanggal 14-15 Maret 1991 untuk membahas masalah-masalah agama Islam seperti: (1) penyelarasan ketiga negara mengenai surat pernikahan; (2) pengawasan ajaran sesat; (3) penentuan tarikh mulainya bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri; (4) penapisan atau sensor bahan tertulis dan elektronik tentang Islam; (5) meningkatkan kerjasama ulama dan pegawai pemerintah yang menangani masalah Islam di ketiga negara itu (*Antara*, 11-3-1991).

Menteri pada Kantor Perdana Menteri Malaysia, Datu Abang Haji Abu Bakar bin Datu Bandar Abang Haji Mustapha, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) umat Islam di dunia saat ini masih menghadapi tantangan yang sangat berat seperti perang di Teluk Persia, dan Afghanistan; (2) masalah-masalah yang dibahas dalam pertemuan ini merupakan masalah yang sangat mendasar bagi umat Islam di kawasan ASEAN.

Sementara itu Menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali mengatakan bahwa: (1) umat Islam di kawasan ASEAN mempunyai berbagai kesamaan latar belakang; (2) kerjasama ini sangat penting bagi ketiga negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, oleh karena itu perlu diadakan kerjasama dalam bidang administrasi dan dakwah Islam (*Antara*, 15-3-1991).

Pertemuan sepakat untuk: (1) membuat mekanisme guna memerangi dan membasmi faham atau ajaran Islam yang menyeleweng dan sesat demi mempertahankan kesucian aqidah Islam; (2) meningkatkan koordinasi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan tetap dan Pusat Ilmu Falak Universitas Sains Malaysia se-

bagai sekretariat untuk menyelaraskan taqvim; (3) mengadakan pertukaran informasi tentang ajaran yang telah difatwakan sebagai sesat di suatu negara kepada negara lainnya, termasuk pula pembendungan bahan tertulis dan elektronik aliran sesat itu serta mengadakan pertemuan koordinasi pembahasan ajaran yang diduga sesat; (4) mengadakan mekanisme kerjasama dalam masalah perkawinan sehingga sepasang orang tidak bisa mengaku secara mudah bahwa mereka pasangan suami isteri di negara lain dengan menunjukkan dokumen yang jelas dan diakui oleh ketiga negara; (5) mengadakan pertemuan ulama ketiga negara sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun dengan tempat bergiliran serta saling memberikan bantuan kepakaran dalam berbagai bidang; (6) mengadakan pertemuan tidak resmi para Menteri Agama ke-3 di Indonesia pada akhir tahun 1991 (*Antara*, 15-3-1991).

4. Dialog Sastrawan ASEAN

Dialog Sastrawan ASEAN atau Dialog Utara ASEAN ke-5 berlangsung di Alorstar Kedah Malaysia tanggal 28-30 April 1991, dihadiri oleh 200 sastrawan dari seluruh anggota ASEAN untuk membahas dan saling tukar menukar pengalaman di bidang sastra ASEAN. Dalam pertemuan ini, Indonesia mengirimkan 11 orang utusan yang terdiri atas Lazuardi Anwar, B.Y. Tan, A. Rahim Kahar, Damiri Mahmud, Ali Sukardi, Drs. Syafwan Hadi Umri, A. Jalil Sidin, Drs. Miar Harahap, Dr. A. Samin Siregar, H. Subammino dan Zainuddin Tamir Koto, sebagai ketua rombongan (*Antara*, 25-4-1991).

B. KERJASAMA KESEHATAN

1. Kerjasama Bidang Farmasi

Pertemuan Kelompok Kerja ASEAN Bidang Farmasi ke-10 berlangsung di Singapura tanggal 25 Februari 1991 untuk merumuskan rencana-rencana kerjasama teknis bidang farmasi yang berkesinambungan selama lima tahun mendatang.

Menteri Kesehatan Singapura, Dr. Aline Wong, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) sudah waktunya bagi pelatihan para apoteker dari negara-negara anggota ASEAN untuk mengevaluasi obat-obatan, karena kelompok ini mulai mendaftarkan produk obat-obatan dalam pasar negara mereka; (2)

para petugas dari enam negara anggota ASEAN telah menjalani pelatihan farmasi di dalam lingkungan maupun di luar kelompoknya; (3) pengembangan bersama standar referensi yang banyak jumlahnya di kalangan laboratorium pengawas obat-obatan nasional negara-negara anggota ASEAN sangat menguntungkan para apoteker ASEAN; (4) pertukaran informasi tentang obat-obatan yang tercatat seperti di Malaysia dan Singapura sangat membantu kedua negara itu untuk menjamin bahwa hanya produk-produk aman yang diijinkan yang dijual di kedua negara tersebut (*Antara*, 25-2-1991).

2. Kongres Infertilitas ASEAN ke-1

Kongres ASEAN mengenai Infertilitas (Kemandulan) dan Reproduksi dengan Bantuan ASEAN ke-1 akan berlangsung di Jakarta tanggal 25-29 Mei 1991, untuk mempertegas rumusan tentang standar profesi sebagai upaya menyeragamkan pelayanan pengobatan infertilitas di negara-negara anggota ASEAN serta meningkatkan kesadaran semua pihak tentang kemajuan infertilitas di ASEAN.

Ketua Pelaksana Prof. Dr. Sudradji Sumapraja mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 9 Maret 1991 bahwa: (1) penanganan infertilitas di negara-negara ASEAN telah mengalami kemajuan yang menggembirakan; (2) keberhasilan dokter-dokter Singapura mengembangkan metode terbaru mengenai pengobatan infertilitas dengan cara mikro manipulasi merupakan kemajuan yang sangat penting; (3) metode ini membuat kehamilan dapat terjadi hanya dengan bantuan memasukkan satu sampai dua sel sperma suami dengan menggunakan jarum khusus ke sel telur isteri; (4) metode ini akan dibahas dalam kongres dengan dukungan Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI), Perkumpulan Andrologi Indonesia (Pandi), RSAB Harapan Kita dan Fakultas Kedokteran UI; (5) saat ini di Indonesia terdapat sekitar tiga juta pasangan suami isteri yang mendambakan anak namun keinginan mereka belum terlayani; (6) sejak kelahiran Nugroho Karyanto sebagai bayi tabung pertama di Indonesia, kini teknologi bayi tabung di Indonesia telah berhasil menolong sekitar 67 kehamilan; (7) penyebab utama terjadinya kemandulan adalah infeksi pada alat reproduksi akibat timbulnya parutan pada bekas infeksi sehingga mengganggu gerakan sperma menuju ke sel telur; (8) sekitar 10-15% dari pasangan usia subur di Indonesia mengalami kemandulan yang disebabkan oleh

infeksi pada alat reproduksi; (9) pemerintah kini telah mempercayakan kepada RS Cipto Mangunkusumo, FKUI dan RSAB Harapan Kita untuk menerapkan teknologi dalam masalah pengobatan infertilitas karena mempunyai peralatan yang cukup lengkap; (10) pemerintah menunjuk RSCM dan RSAB Harapan Kita sebagai pusat penelitian dan pengembangan pelayanan bayi tabung di Indonesia yang merupakan program prioritas Depkes karena selain investasi yang sangat mahal juga sifatnya yang masih merupakan pengembangan dan penelitian; (11) program pelayanan bayi tabung bukan hanya menghadapi kendala aspek teknologi tetapi juga berbagai aspek lainnya seperti moral, etika, hukum dari agama yang masih memerlukan pengkajian lebih mendalam, sehingga dibutuhkan pengendalian dalam program ini (*Antara*, 10-3-1991).

III. KERJASAMA NON-PEMERINTAH

A. DIALOG TAHUNAN AIPO-PARLEMEN ASEAN

Sesuai pertemuan dengan Ketua Delegasi Parlemen Eropa, Van Ray, di Gedung MPR/DPR tanggal 26 Maret 1991, Sekjen AIPO Dr. Johan Maramis mengatakan kepada pers bahwa: (1) parlemen Eropa mengusulkan agar dialog tahunan AIPO-Parlemen Eropa dipindahkan dari Bangkok ke Jakarta; (2) dialog yang dijadwalkan berlangsung di Bangkok tanggal 17-21 Maret 1991 dipindahkan pada tanggal 11-15 November atau 9-13 Desember 1991; (3) Sekjen AIPO agar meninjau Sekretariat Parlemen Eropa di Strassburg untuk melihat cara kerja Parlemen Eropa; (4) topik dialog mengenai berbagai masalah regional dan internasional, kerjasama ekonomi ASEAN-Eropa, masalah narkotika dan penyakit AIDS, serta lingkungan hidup dan alih teknologi (*Antara*, 26-3-1991).

B. KERJASAMA PEMUDA ASEAN

1. Konperensi Pemuda ASEAN

Sesuai diterima Wapres Sudharmono di Istana Merdeka Selatan tanggal 22 Maret 1991, Menpora Ir. Akbar Tanjung mengatakan kepada pers bahwa: (1) Konperensi Pemuda ASEAN ke-11 akan diselenggarakan di Jakarta tanggal 28 April 1991; (2) pertemuan akan menstapakan pimpinan baru dan menyusun program kerja untuk waktu-waktu mendatang; (3) negara-negara

ASEAN sepakat untuk mendorong, membina dan meningkatkan kerjasama antar pemuda, karena generasi muda ini kelak akan menjadi pemimpin bangsa; (4) semangat ASEAN perlu terus dipelihara dan kerjasama yang telah dirintis oleh para pemimpin ASEAN perlu dilanjutkan, dikembangkan di tingkat masyarakat termasuk generasi muda; (5) masalah kepemudaan ASEAN telah dibicarakan dalam pertemuan trilateral di Batam antara Malaysia, Singapura dan Indonesia. Disepakati bahwa tanggal 8 Agustus ditetapkan sebagai tahun pemuda ASEAN yang dicanangkan pada tahun 1992 (*Kompas*, 23-3-1991).

Ketua Umum DPP KNPI, Tjahjo Kumolo SH, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 22 April 1991 bahwa: (1) Kongres Pemuda ASEAN yang akan berlangsung tanggal 24-25 April 1991 itu akan dibuka oleh Wakil Presiden Sudharmono; (2) kongres bertujuan memilih pengurus baru dan membahas program kerja untuk dua tahun mendatang; (3) meskipun usia CAYC (*Committee for ASEAN Youth Cooperation*) telah 11 tahun, pemuda Indonesia baru sekali menduduki jabatan Sekjen yang dijabat oleh Marzuki Darusman SH pada awal berdirinya; (4) dalam kongres ini Indonesia akan mengusulkan tanggal 8 Agustus sebagai Hari Pemuda ASEAN dan mencalonkan empat orang tokoh pemuda dalam jabatan teras organisasi ini yaitu Bambang Yoga Sugama, Wenny Nasution, Didiet Haryadi dan Tjahjo Kumolo; (5) saat ini Ketua Umum CAYC dijabat oleh Pemuda Brunei Darussalam anggota MBB (Majelis Belia Brunei Darussalam) dengan Sekjen dari Malaysia anggota Majelis Belia Malaysia; (6) sejak Februari 1991 CAYC telah diakui secara resmi sebagai salah satu bagian dari ASEAN; (7) target yang akan dicapai KNPI dalam kongres itu antara lain agar program organisasi pemuda dunia dapat berkaitan dengan program CAYC (*Angkatan Bersenjata*, 23-4-1991); (8) Indonesia berharap dapat memegang jabatan Ketua Umum CAYC untuk periode 1991-1993; (9) jika Indonesia terpilih akan semakin menghidupkan Indonesia di kawasan ASEAN Khususnya dan dunia internasional pada umumnya. Terutama dalam upaya menciptakan perdamaian dan menggalang persahabatan di antara para pemuda; (10) Indonesia akan mengusulkan agar Sekretariat CAYC dipindahkan dari Kuala Lumpur ke Jakarta, sebab kantor Sekretariat ASEAN juga ada di Jakarta (*Suara Pembauran*, 24-4-1991).

Wapres Sudharmono mengatakan pada pembukaan Konperensi Pemuda ASEAN di Istana Merdeka Selatan tanggal 24 April 1991 bahwa: (1) suatu kerjasama akan

mempunyai peluang dan kemungkinan berkembang jika didukung oleh semangat kemitraan dan saling menguntungkan; (2) pemuda adalah harapan bangsa. Hari depan suatu bangsa dan negara terletak di tangan para pemuda, karena itu para pemuda harus mengembangkan diri mereka sendiri, mengenali tantangan-tantangan ataupun peluang yang akan mereka hadapi, baik di dalam negeri masing-masing, di tingkat regional maupun di tingkat global; (3) ASEAN telah mencatat kemajuan dalam pengembangan kerjasama regional untuk kepentingan bersama. Tanggung jawab para pemuda ASEAN adalah melanjutkan dan meningkatkan kerjasama itu; (4) kehadiran organisasi pemuda ASEAN bukan saja mempunyai arti penting untuk memperjuangkan kepentingan ASEAN tetapi juga dapat memberikan peranan yang lebih baik untuk menghadapi perkembangan dunia yang terus berubah dan berdampak luas; (5) konperensi ini selain untuk bertukar pikiran dan pandangan, hendaknya juga dimanfaatkan untuk merintis terobosan-terobosan baru yang mempunyai jangkauan ke depan; (6) organisasi pemuda ASEAN perlu melakukan kerjasama yang bersifat strategis antara lain mengenai studi tentang masa depan, kawasan khususnya dan dunia pada umumnya, untuk semakin memperlancar saling pengertian serta kerjasama untuk mewujudkan tujuan ASEAN (*Suara Pembaruan*, 24-4-1991); (7) ASEAN bukan merupakan organisasi yang eksklusif, melainkan selalu membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara atau organisasi regional lainnya (*Kompas*, 25-4-1991).

Sementara itu Menpora Ir. Akbar Tanjung mengatakan bahwa: (1) Indonesia sangat berkepentingan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar negara anggota ASEAN untuk mencapai cita-cita dan tujuan ASEAN; (2) untuk penggalangan kerjasama antar bangsa-bangsa sangat tergantung dari kesadaran dan tanggung jawab pemudanya; (3) melalui kerjasama antar bangsa, para pemuda dapat memperluas wawasan, memperdalam pengertian dan menghargai kepentingan bangsa lain, mempertinggi persahabatan serta menempatkan peran dan posisi pemuda bagi masa depan; (4) kesatuan dan kesetiakawanan pemuda ASEAN sangat diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan serta terjaganya kestabilan di kawasan Asia Tenggara (*Pelita*, 25-4-1991).

Hasil-hasil konperensi antara lain: (1) pemuda ASEAN sepakat untuk meningkatkan perannya baik di tingkat nasional, regional maupun internasional; (2) program CAYC di tingkat nasional adalah menyelenggarakan seminar dan latihan kerja bagi para pemuda

dengan membentuk team pemikir yang didukung oleh para mantan pengurus CAYC untuk memecahkan persoalan kepemudaan di ASEAN; (3) program di tingkat regional adalah meningkatkan dialog antar anggota; (4) program di tingkat internasional adalah menggalakkan dialog dengan negara-negara di luar anggota CAYC seperti Australia, AS dan Kanada. Melalui dialog itulah diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul; (5) Dwie Riawenny S. Nasution (Indonesia) ditunjuk sebagai Ketua Umum, Abang Yusof (Malaysia) sebagai Sekjen dan Srisak Thairry (Muangthai) sebagai Bendahara; (6) tanggal 8 Agustus 1992 ditetapkan sebagai Hari Pemuda ASEAN. Di samping itu disepakati perlunya penerbitan buletin CAYC yang berisikan segala kegiatan pemuda di kawasan ASEAN (*Kompas*, 26-4-1991).

2. Seminar Kepemimpinan Mahasiswa ASEAN

Seminar Kepemimpinan Mahasiswa ASEAN berlangsung di Pulau Pinang Malaysia tanggal 22-24 April 1991 untuk membahas masa depan ASEAN pada dasawarsa 1990-an dan sesudahnya, diikuti oleh 250 pemuda dari ASEAN kecuali Singapura.

Menteri Luar Negeri Malaysia Abdul Ahmad Badawi, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) ASEAN saat ini berada pada persimpangan jalan dan negara-negara anggotanya harus mengajukan strategi baru tentang perubahan politik dan ekonomi tahun 1990-an, termasuk pembentukan sistem perdagangan internasional; (2) ilmu pengetahuan dan teknologi penting untuk mengikuti laju pembangunan sebab tidak ada negara di dunia yang berharap dapat mencapai kemajuan tanpa memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) pemuda ASEAN harus dilatih sebagai pembaharu dan bukan sebagai konsumen teknologi yang hanya mengandalkan teknologi dari negara-negara maju; (4) para pemuda ASEAN harus mempertahankan kebudayaan negara mereka dan tidak menjadi penjiplak budaya-budaya Barat; (5) sebagai calon pemimpin di wilayah Asia Tenggara para pemuda ASEAN harus memelihara nilai-nilai budaya mereka, karena hal itu dapat menjadi benteng terhadap pengaruh buruk yang dapat merusak moral masyarakat di beberapa negara maju (*Merdeka*, 23-4-1991).

Mantan Menlu RI, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, mengatakan bahwa: (1) ASEAN makin menjadi kurang relevan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anggotanya, karena mereka mengambil